

Katalog:

ANALISIS

*Incremental Labour
Output Ratio (ILOR)*

**Wilayah Pembangunan
Provinsi Jawa Tengah
2018-2022**

<https://jateng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

ANALISIS

*Incremental Labour
Output Ratio (ILOR)*

**Wilayah Pembangunan
Provinsi Jawa Tengah
2018-2022**

<https://jateng.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Analisis *Incremental Labour Output Ratio* (ILOR) Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2018-2022

Katalog :
Nomor Publikasi : 33000.23104
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah halaman : xiv + 36 halaman
Penyusun Naskah : BPS Provinsi Jawa Tengah
Penyunting : BPS Provinsi Jawa Tengah
Pembuat Kover : BPS Provinsi Jawa Tengah
Diterbitkan Oleh : © BPS Provinsi Jawa Tengah
Dicetak Oleh : CV. Surya Lestari
Sumber Ilustrasi : canva.com

“Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari BPS Provinsi Jawa Tengah”

TIM PENYUSUN

Analisis Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2018-2022

Pengarah

Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si

Penanggung Jawab

Didik Nursetyohadi, M.Agb

Editor

A'idzin, SE, M.A., M.Eng

Penulis

Hesti Susilowati, S.ST

Pengolah Data

Asy-Syifa Hanum Farida, S.ST

Hesti Susilowati, S.ST

Gambar Kulit

Joko Mulyono

KATA PENGANTAR

Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam menghasilkan output ekonomi dibutuhkan faktor produksi sumber daya baik sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengetahui pengaruh dari peningkatan pertumbuhan ekonomi terhadap besarnya penyerapan tenaga kerja adalah ILOR (*Incremental Labour Output Ratio*).

Publikasi Analisis *Incremental Labour Output Ratio* (ILOR) Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2018-2022 merupakan publikasi yang diterbitkan dalam rangka melengkapi analisis kebutuhan tenaga kerja dalam output perekonomian di Jawa Tengah menurut wilayah pembangunan selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2018-2022.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan publikasi ini, kami sampaikan terima kasih. Kami juga mengharapkan adanya masukan dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya, kami berharap semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat kepada segenap pengguna data.

Semarang, Desember 2023
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah

Dadang Hardiwan



DAFTAR ISI
Analisis Incremental Labour Output Ratio (ILOR)
Wilayah Pembangunan
Provinsi Jawa Tengah 2018-2022

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penulisan.....	5
1.3. Sistematika Penulisan	5
BAB II METODOLOGI.....	7
2.1. Konsep dan Definisi.....	7
2.2. Metodologi	12
2.3. Sumber Data	15
2.4. Potensi dan Tantangan Jawa Tengah	15
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	19
3.1. Perkembangan Ekonomi menurut WP	19
3.2. Perkembangan Tenaga Kerja menurut WP	23
BAB IV ILOR WILAYAH PEMBANGUNAN	25
4.1. Perkembangan ILOR Wilayah Pembangunan	25
4.2. ILOR Wilayah Pembangunan menurut 3 Sektor Lapangan Usaha.....	29
BAB V KESIMPULAN.....	35
DAFTAR PUSTAKA	36

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 3.1.	Lapangan Usaha dan Kontribusi Terbesar menurut Wilayah Pembangunan 2022 (persen)	22
Tabel 4.1.	Nilai ILOR menurut Wilayah Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018-2022	26
Tabel 4.2.	Tabel 4.2. Rata-rata ILOR 5 tahun terakhir menurut Wilayah Pembangunan Jawa Tengah 2018-2022.....	29
Tabel 4.3.	Nilai ILOR menurut Wilayah Pembangunan dan Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Perdagangan Jawa Tengah 2022	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi menurut Wilayah Pembangunan 2018-2022 (persen).....	21
Gambar 3.2. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja menurut Wilayah Pembangunan Jawa Tengah Agustus 2018-2022	24
Gambar 4.1. Perkembangan ILOR Wilayah Pembangunan Jawa Tengah 2018-2022.....	28
Gambar 4.2. Nilai ILOR Kawasan Pembangunan Jawa Tengah menurut Sektor Pertanian 2018-2022	30
Gambar 4.3. Nilai ILOR Kawasan Pembangunan Jawa Tengah menurut Sektor Industri Pengolahan 2018-2022.....	31
Gambar 4.4. Nilai ILOR Kawasan Pembangunan Jawa Tengah menurut Sektor Industri Pengolahan 2018-2022.....	32

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pembangunan ekonomi tidak lagi hanya dilihat dari bagaimana keberhasilan pertumbuhan ekonominya, melainkan juga seberapa berhasil apa output yang tercipta dalam menyerap tenaga kerja. Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bonus demografi. Jika dapat memanfaatkannya dalam pasar tenaga kerja yang produktif, akan semakin meningkatkan output ekonomi Jawa Tengah. Melalui analisis Indikator ILOR (Incremental Labour Output Ratio) dan produktivitas tenaga kerja, didapat suatu ukuran elastisitas yang dapat mengukur efektifitas peningkatan output terhadap tenaga kerja di suatu wilayah dalam waktu tertentu sekaligus produktivitasnya.

Rata-rata ILOR menurut kawasan pembangunan di Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Barlingmas cakeb sebesar 0,017; Purwomanggung sebesar 0,028; Subosukawonosraten sebesar 0,018; Kedungsepur sebesar 0,013; Banglor sebesar 0,026; Wanarakuti sebesar 0,014; Petanglong sebesar 0,026 dan Bregasmalang sebesar 0,025. Nilai rata-rata ILOR tertinggi selama lima tahun terakhir adalah kawasan Purwomanggung yaitu sebesar 0,028 yang artinya secara rata-rata, setiap meningkatkan output perekonomian kawasan Purwomanggung sebesar 1 milyar rupiah, akan menyerap tenaga kerja sebanyak 28 orang per tahun.

Di antara 8 wilayah pembangunan di Jawa Tengah, pada tahun 2022, 3 sektor lapangan usaha yang dominan antara lain sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Kecuali di kawasan Kedungsepur dan Banglor dimana sektor pertanian digantikan oleh sektor Konstruksi dan sektor Pertambangan dan Penggalian Sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor lainnya.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah proses berkelanjutan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada hakekatnya, pembangunan merupakan usaha untuk mengubah keseimbangan dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik ke keseimbangan baru pada tingkat kualitas yang dianggap lebih tinggi, sehingga dapat diartikan bahwa tujuan pembangunan adalah pemerataan dalam mensejahterakan rakyat. Di negara berkembang, perhatian utama pembangunan terfokus pada dilema antara pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pendapatan (Lestari dkk, 2021). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan khususnya di bidang ekonomi. Selain yang digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan, juga berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang.

Dalam teori ilmu ekonomi pembangunan, antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan terjadi *tradeoff*. Apabila program pembangunan dititik beratkan pada pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi tetapi tidak diikuti oleh pemerataan pendapatan dan distribusi pendapatan cenderung timpang, sebaliknya jika pembangunan lebih dititik beratkan pada program pemerataan, maka distribusi pendapatan akan lebih baik, tetapi pertumbuhan ekonomi cenderung rendah. Menurut Lestari, dkk (2021), beberapa negara maju telah melakukan pembangunan menggunakan strategi *Redistribution With Growth*, artinya dapat sekaligus redistribusi pendapatannya itu

dengan menitik beratkan proyek-proyek pembangunan yang berwawasan pemerataan yang menyerap banyak tenaga kerja.

Tujuan pembangunan ekonomi hampir disemua daerah adalah tentang bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Tidak terkecuali Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu dari lima daerah penyumbang perekonomian terbesar di Indonesia, yakni sekitar 8,15 persen pada tahun 2022, Jawa Tengah memiliki peranan yang cukup penting dalam sistem perekonomian di negara ini.

Masalah utama dan mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia adalah masalah upah yang rendah dan tingkat pengangguran yang tinggi serta pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Hal tersebut disebabkan karena, pertumbuhan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja menimbulkan pengangguran yang tinggi. Pengangguran merupakan salah satu masalah utama dalam jangka pendek yang selalu dihadapi setiap negara. Karena itu, setiap perekonomian negara pasti menghadapi masalah pengangguran, yaitu pengangguran alamiah.

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik instansi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. SDM yang banyak dan

berkualitas merupakan investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (ILOR Lumajang, 2017).

Pembangunan daerah tidak hanya berfokus meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat saat ini saja, melainkan harus dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang berkelanjutan (Syukri, 2021). Oleh sebab itu, salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah Jawa Tengah adalah membagi wilayah-wilayahnya menjadi beberapa kelompok kawasan pembangunan yang memiliki karakter ekonomi yang sama atau serupa. Pembagian kawasan ini biasa disebut dengan teori ekonomi aglomerasi. Teori ini dikenalkan oleh Marshall yang menyatakan bahwa kegiatan ekonomi eksternal seperti *pooling* pasar tenaga kerja, *input sharing* dan *technological spillover* yang mendorong suatu wilayah akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Jawa Tengah berharap, hasil perekonomian ini dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata. Oleh karena itu, diterbitkanlah aturan pembagian kawasan pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.

Perekonomian di Jawa Tengah, ditopang oleh 3 besar sektor ekonomi yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian, yakni sektor Industri Pengolahan, Pertanian, dan Perdagangan. Sektor Industri Pengolahan menjadi sentra utama perekonomian Jawa Tengah dengan kontribusi sebesar 33,93 persen pada tahun 2022, diikuti sektor Pertanian yang berkontribusi sebesar 13,53 persen dan Perdagangan dengan kontribusinya sebesar 13,60 persen. Ketiga sektor tersebut berkontribusi lebih

dari lima puluh persen perekonomian di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja pada ketiga sektor tersebut akan meningkatkan output di Jawa Tengah.

Perluasan lapangan kerja diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan menciptakan kembali lapangan kerja baru. Untuk itu, informasi mengenai keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja sangat diperlukan pemerintah dalam melanjutkan program pembangunan (ILOR Lumajang, 2017). Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengetahui pengaruh dari peningkatan pertumbuhan ekonomi terhadap besarnya penyerapan tenaga kerja adalah ILOR (*Incremental Labour Output Ratio*).

Indikator ILOR dapat menjelaskan seberapa besar penambahan jumlah penduduk usia kerja yang terserap dalam aktivitas ekonomi dengan adanya penambahan output perekonomian di suatu wilayah, terutama wilayah-wilayah pembangunan di Jawa Tengah. Dengan angka ILOR dapat diketahui bahwa untuk menambah kesempatan kerja, output harus tumbuh, sebab setiap unit pertambahan output diharapkan akan berdampak menambah kesempatan kerja sebanyak nilai ILOR. Di samping itu besaran ILOR dapat digunakan untuk melihat produktifitas dan efisiensi tenaga kerja yang diciptakan (ILOR Lumajang, 2017).

1.2. Tujuan Penulisan

Secara umum publikasi ini disusun untuk mendapatkan sebuah ukuran kuantitatif sebagai bahan kajian ekonomi makro di Jawa Tengah khususnya untuk:

1. Mengetahui kebutuhan tenaga kerja (ILOR) menurut kawasan pembangunan di Jawa Tengah selama lima tahun terakhir
2. Mengetahui kebutuhan tenaga kerja (ILOR) menurut sektor ekonomi (lapangan usaha) pada masing-masing kawasan pembangunan selama lima tahun terakhir

1.3. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang rinci serta mempermudah pembahasan, maka publikasi ini disajikan dengan sistematika penulisan yang terdiri atas lima bab, yakni:

Bab I merupakan Pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang penulisan publikasi, Tujuan Penulisan dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi mengenai Metodologi yang membahas tentang Konsep dan Definisi, Metodologi serta Sumber Data.

Bab III mengenai Kondisi Sosial Ekonomi Wilayah Pembangunan yang menjelaskan tentang kondisi Kependudukan, Tenaga Kerja dan Perekonomian.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan yang mengulas tentang ILOR Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, mulai dari perkembangannya dan menurut sektor lapangan usaha.

Bab V merupakan Kesimpulan yang dibuat berdasarkan pembahasan dan disesuaikan dengan tujuan.

BAB 2

METODOLOGI

2.1. Konsep dan Definisi

➤ Ketenagakerjaan

Menurut BPS, penduduk dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja merupakan penduduk yang berusia 15 tahun keatas, penduduk usia kerja ini dibedakan menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja itu sendiri dibagi lagi menjadi dua golongan yaitu bekerja dan pengangguran. Sementara bukan angkatan kerja dibagi menjadi tiga kelompok yaitu sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya. Kategori bekerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang sedang aktif bekerja dan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja tetapi untuk sementara waktu tidak bekerja (sakit, cuti, menunggu panen atau mogok kerja).

Menurut UU No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Jika melihat sesuai konsep BPS, tenaga kerja dapat diartikan sebagai penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam berturut-turut (tidak terputus) dalam seminggu terakhir sebelum waktu pendataan. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi. Mengacu pada definisi tersebut, tenaga kerja/pekerja dapat dibedakan menjadi pekerja tetap

dan pekerja tidak tetap. Namun jika dilihat dari balas jasanya, pekerja bisa dibedakan menjadi pekerja dibayar dan pekerja tidak dibayar.

- a. Pekerja tetap adalah pekerja yang menerima upah/gaji pokok secara tetap setiap periode pembayaran (umumnya bulanan). Pekerja tetap terdiri dari:
 - Direktur/pemilik adalah orang yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap perusahaan
 - Administrasi adalah pekerja yang menjalankan semua kegiatan tata usaha/administrasi di perusahaan (urusan pegawai, pembukuan, dan lain-lain).
 - Tenaga teknik/produksi adalah pekerja yang secara langsung bekerja dalam proses produksi termasuk mereka yang bertugas merawat dan memperbaiki mesin-mesin produksi.
 - Lainnya adalah pekerja yang tidak termasuk dalam kategori di atas (misalnya sopir, satpam, dan lain-lain).
- b. Pekerja tidak tetap adalah pekerja yang dibayar oleh perusahaan berdasarkan hasil kerja yang dihasilkan. Misalnya pekerja harian lepas dan pekerja borongan, kecuali pekerja borongan yang bekerja di rumah sendiri secara makloon.

Seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok dan sebagainya. Contohnya:

- a. Pekerja tetap, pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/

peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya.

- b. Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah).
- c. Pekerja profesional (mempunyai keahlian tertentu/khusus) yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pekerjaan berikutnya/pesanan dan sebagainya. Seperti dalang, tukang cukur, tukang pijat, dukun, penyanyi komersial dan sebagainya

Pengangguran terbuka, terdiri dari:

1. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka:

- Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan.
- Yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena sesuatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan asalkan

seminggu yang lalu masih mengharapkan pekerjaan yang dicari. Mereka yang sedang bekerja dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

2. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila tindakannya nyata, seperti: mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat ijin usaha dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.

Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha. Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.

3. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
4. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sedangkan pekerja tidak penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja tidak penuh terdiri dari:

1. Setengah penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan (dahulu disebut setengah pengangguran terpaksa).
2. Pekerja paruh waktu adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (dahulu disebut setengah pengangguran sukarela).

➤ **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Output adalah hasil yang diperoleh dari pendayagunaan seluruh faktor produksi baik berbentuk barang atau jasa seperti tanah, tenaga kerja, modal dan kewiraswastaan. Dari segi ekonomi nasional, output merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor domestik dalam negeri dalam suatu periode tertentu.

Namun dalam pengertian ILOR (*Incremental Labour Output Ratio*), output adalah tambahan produk dari hasil kegiatan ekonomi dalam suatu periode atau nilai-nilai yang merupakan hasil pendayagunaan faktor-faktor produksi.

Output ini merupakan seluruh nilai tambah atas dasar biaya faktor produksi yang dihasilkan dari seluruh kegiatan usaha setelah dikurangi dengan biaya antara (upah/gaji, bahan baku dan bahan penolong) atau biasa disebut dengan Nilai Tambah Bruto (NTB).

Dalam ekonomi daerah, NTB ini biasa disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu daerah yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau nonresiden.

Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku), yakni PDRB yang disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, BPS menghitung PDRB dengan pendekatan produksi dan pengeluaran, sedangkan pendekatan pendapatan belum dilakukan.

2.2. Metodologi

Incremental Labor Output Ratio (ILOR) merupakan koefisien yang menghubungkan antara penambahan tenaga kerja (ΔL) terhadap kenaikan output atau produk yang dihasilkan (ΔY). Artinya jika terjadi penambahan tenaga kerja, maka output akan meningkat

*Analisis Incremental Labour Output Ratio (ILOR)
Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2018-2022*

(*ceteris paribus*). Penambahan tenaga kerja merupakan penambahan jumlah penduduk yang bekerja di seluruh sektor ekonomi, sedangkan penambahan output dicerminkan melalui penambahan PDRB.

Hubungan antara perubahan nilai output dengan penyerapan tenaga kerja dapat dirumuskan dalam indikator ILOR dan Produktifitas Tenaga Kerja (PTK). Indikator ILOR digunakan untuk melihat tambahan jumlah orang yang bekerja dengan adanya peningkatan satu satuan nilai PDRB. Sedangkan PTK untuk melihat seberapa besar kinerja dari setiap tenaga kerja dalam menghasilkan output. Dengan demikian ILOR bermakna seberapa besar tenaga kerja yang terserap jika terjadi penambahan output per satuan wilayah. ILOR dapat dinyatakan sebagai:

$$ILOR = \frac{\Delta L}{\Delta Y} \dots\dots\dots (1)$$

dimana:

$$\Delta L = L_t - L_{t-1} = \text{penambahan tenaga kerja}$$

$$\Delta Y = Y_t - Y_{t-1} = \text{penambahan output (PDRB ADHK)}$$

Dengan menggunakan rumus (1) dapat diperoleh nilai ILOR untuk masing-masing lapangan usaha per tahun. Untuk mendapatkan angka ILOR dalam periode tertentu digunakan metode rata-rata sederhana. Rumus ILOR yang digunakan untuk periode t hingga periode t+i adalah sebagai berikut:

$$ILOR = \frac{\sum_{n=t}^{t+i} \Delta L}{\sum_{n=t}^{t+i} \Delta Y} \dots\dots\dots (2)$$

Disamping itu dapat diketahui juga mengenai produktifitas tenaga kerja menggunakan indikator Produktifitas Tenaga Kerja (PTK) yang dinyatakan sebagai berikut:

$$PTK = \frac{Y}{L} \dots\dots\dots (3)$$

dimana:

Y = output

L = jumlah tenaga kerja

ILOR yang dihitung rata-rata per tahun dalam kurun waktu tertentu, misalnya 5 tahunan, dianggap akan mengatasi bias yang terjadi akibat adanya fluktuasi tahunan dalam penyerapan tenaga kerja maupun kinerja ekonomi yang tidak stabil.

Menurut ILOR Lumajang (2017), besaran ILOR dapat dilihat dari dua sisi. Pertama dikaitkan dengan peluang penyerapan tenaga kerja, ILOR bermakna positif dalam arti setiap tambahan satu satuan unit PDRB ADHK akan mampu menyerap sejumlah tenaga kerja. Sehingga semakin besar ILOR semakin baik karena semakin banyak tenaga kerja yang dapat diserap. Tentunya, untuk melihat besarnya angkatan kerja yang tidak terserap masih harus melihat nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kedua, jika dikaitkan dengan produktifitas maka semakin besar nilai ILOR berarti tenaga kerja semakin tidak produktif karena nilai PTK semakin kecil. Sehingga kondisi ideal yang ingin dicapai tentu nilai ILOR rendah dan pada saat yang sama nilai TPT juga rendah. Artinya sedikit pengangguran sedangkan para pekerja masih mampu menghasilkan barang/jasa secara optimal sehingga tingkat kejahteraan diharapkan tercapai atau telah terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Jika besaran ILOR bernilai negatif berarti dalam kurun waktu tertentu ada ketimpangan antara perubahan tenaga kerja yang terserap dan perubahan output perekonomian. Ada kalanya telah terjadi pengurangan dalam penyerapan tenaga kerja tetapi masih

mampu menghasilkan nilai output yang cukup tinggi. Atau banyak tenaga kerja yang terserap tetapi justru terjadi penurunan nilai tambah bruto. Kedua hal tersebut akan sama-sama berdampak kurang baik pada dimensi sosial maupun ekonomi. Untuk daerah-daerah yang masih berkembang tentunya akan mengutamakan terserapnya tenaga kerja dalam jumlah besar terlebih dahulu pada tingkat produktifitas yang masih relatif baik.

2.3. Sumber Data

Dalam publikasi ini, sumber data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, dimana data jumlah tenaga kerja dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus yang telah dirilis dalam Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah 2018-2022. Sedangkan data PDRB dari Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah menurut Lapangan Usaha 2018-2022.

2.4. Potensi dan Tantangan Jawa Tengah

Dalam Perpres RI No 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal Pemalang disebutkan mengenai potensi dan tantangan Jawa Tengah.

a. Potensi

Dalam rangka mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah, terdapat potensi antara lain:

- 1) Sektor Pertanian dan Industri

Potensi Jawa Tengah yang strategis berada di antara Jawa barat dan Jawa Timur, memiliki ketersediaan lahan untuk dikembangkan antara lain lahan pertanian dan kehutanan yang produktif, ketersediaan sumber daya manusia dengan upah tenaga kerja yang kompetitif.

2) Konektivitas Jalur Arteri Primer Utara (Pantura) dan Pantai Selatan (Pansela) Jawa

Konektivitas Jawa Tengah didukung adanya jalur Arteri Primer Pantura dan Arteri Primer Pansela Jawa Tengah yang membuka potensi untuk pengembangan Jawa Tengah sebagai salah satu pusat logistik barang dan jasa.

3) Simpul Transportasi Udara

Keberadaan infrastruktur transportasi udara di Jawa Tengah didukung oleh dua bandara internasional (ahmad Yani Semarang dan Adi Soemarmo Boyolali) dan dua bandara local (Tunggulwulung Cilacap dan Dewadaru Karimunjawa Jepara) dapat memperkuat konektivitas antar kawasan, termasuk kemajuan sektor kepariwisataan, industry dan perdagangan di Jawa Tengah.

4) Simpul Transportasi Laut

Transportasi Laut di Jawa Tengah didukung oleh Pelabuhan Tanjung Mas Semarang sebagai Pelabuhan Utara, Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap dan Pelabuhan Tegal sebagai Pelabuhan pengumpul dan 8 pelabuhan pengumpan regional (Batang, Sluke Rembang, Tasik Agung Rembang, Juwana Pati, Jepara, Karimunjawa, Legon Bajak dan Kendal), serta tiga Pelabuhan local (Brebek, Pekalongan dan Pemalang). Keberadaan infrastruktur transportasi laut dapat memperkuat konektivitas dan system logistik antar wilayah.

5) Struktur Perkotaan yang hierarki dan terintegrasi

Berdasarkan struktur pusat-pusat perkotaan, Jawa Tengah memiliki 3 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yakni PKN Cilacap, PKN Kedungsepur dan PKN Surakarta, 10 Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berada di Boyolali, Klaten, Tegal, Pekalongan, Kudus, Cepu, Magelang, Wonosobo, Kebumen, Purwokerto, serta 67 Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Selain itu di Jawa Tengah terdapat 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yakni Borobudur dan sekitarnya, Dieng dan sekitarnya, Merapi- Merbabu dan sekitarnya, Karimun Jawa dan sekitarnya, dan Sangiran dan sekitarnya. Keberadaan pusat-pusat perkotaan tersebut berpotensi mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah.

b. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah antara lain sebagai berikut:

- 1) Arah pembangunan ekonomi belum berorientasi keluar (*Outward Looking*) yang bersinergi dengan pengembangan internal wilayah
- 2) Pengembangan regional belum dilaksanakan secara optimal
- 3) Ketersediaan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) sebagai salah satu perangkat operasional pelaksanaan pembangunan
- 4) Belum optimalnya pembangunan daerah yang berkelanjutan

- 5) Belum optimalnya destinasi pariwisata di Jawa Tengah sebagai tujuan wisata
- 6) Belum optimalnya kawasan industri
- 7) Belum optimalnya kesiapan daerah dalam memanfaatkan investasi
- 8) Struktur perekonomian masih timpang

<https://jateng.bps.go.id>

BAB 3

KONDISI SOSIAL EKONOMI

3.1. Perkembangan Ekonomi menurut Wilayah Pembangunan

Kondisi perekonomian suatu daerah dapat dilihat berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (Sirusa BPS).

Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi dilaksanakan secara seimbang untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Oleh karena itu seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah dan swasta memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan terpadu antar sektor, antar program dan antar wilayah. Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi Kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan dan pemerataan Pembangunan ekonomi Kawasan di Jawa Tengah yang terdiri atas:

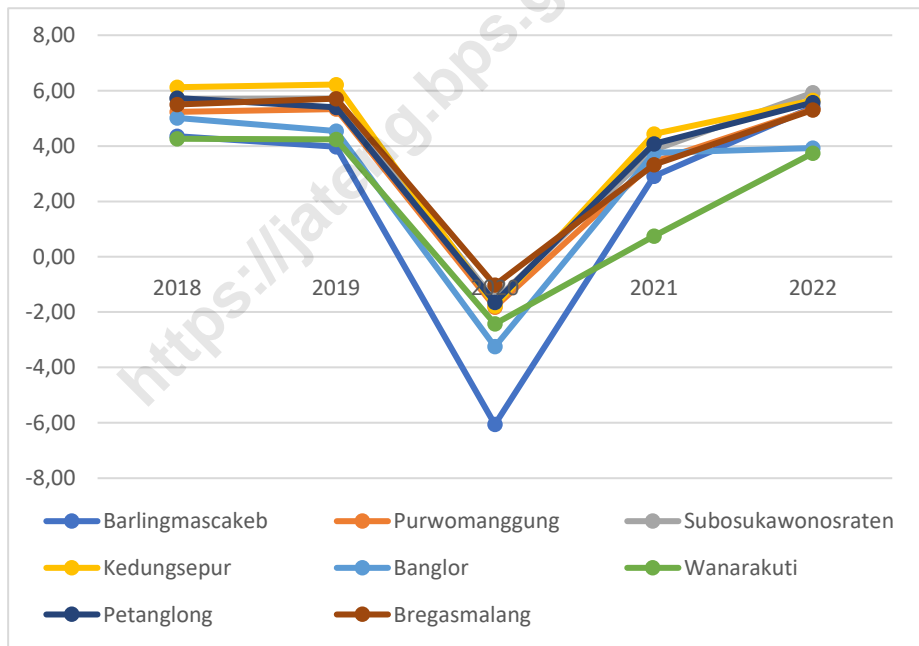
- a. Kawasan Kedungsepur yang terdiri atas Kendal – Kota Semarang – Kota Salatiga – Demak – Grobogan
- b. Kawasan Purwomanggung yang terdiri dari Purworejo – Wonosobo – Magelang – Kota Magelang – Temanggung

- c. Kawasan Bregasmalang yang terdiri atas Brebes – Kota Tegal -Tegal – Pemalang
- d. Kawasan Barlingmascakeb yang terdiri atas Banjarnegara – Purbalingga – Banyumas – Cilacap – Kebumen
- e. Kawasan Petanglong yang terdiri atas Pekalongan – Batang – Kota Pekalongan
- f. Kawasan Wanarakuti yang terdiri atas Jepara – Kudus – Pati
- g. Kawasan Banglor yang terdiri atas Rembang – Blora
- h. Kawasan Subosukawonosraten yang terdiri atas Kota Surakarta – Boyolali – Sukoharjo – Karanganyar – Wonogiri – Sragen – Klaten

Sejalan dengan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembanunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 perlu dilakukan percepatan Pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Oleh karena itu, pemerintah menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional ditentukan oleh laju pertumbuhan ekonomi di daerah yang salah satunya melalui pembangunan ekonomi antar Kawasan.

Dalam lima tahun terakhir (2018-2022) nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di seluruh wilayah pembangunan mengalami pertumbuhan positif setiap tahun kecuali pada tahun 2020 di seluruh wilayah pembangunan mengalami pertumbuhan negatif dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Berikut tren pertumbuhan menurut Wilayah Pembangunan 2018-2022 sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 3.1.

Pada tahun 2018 wilayah pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kedungsepur dengan pertumbuhan sebesar 6,12 persen diikuti kawasan Petanglong yang tumbuh sebesar 5,73 persen. Pada tahun 2020 wilayah pembangunan yang mengalami kontraksi paling dalam adalah kawasan Barlingmascakeb yaitu sebesar minus 6,06 persen diikuti oleh kawasan Banglor sebesar minus 3,25 persen. Sementara itu pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah kawasan Subosukawonosraten, tumbuh positif sebesar 5,92 persen disusul kawasan Petanglong sebesar 5,57 persen dan Kedungsepur sebesar 5,65 persen.



Gambar 3.1. Pertumbuhan Ekonomi menurut Wilayah Pembangunan 2018-2022 (persen)

Sementara itu, menurut sektor lapangan usaha terdapat 3 sektor utama yang menjadi unggulan di setiap wilayah pembangunan, yaitu Industri Pengolahan, Pertanian dan Perdagangan.

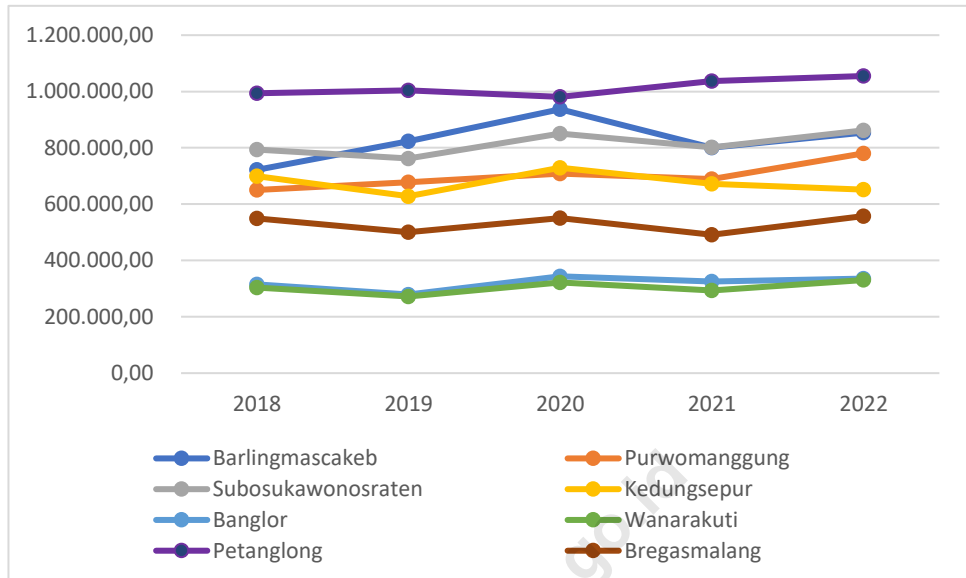
Tabel 3.1 Lapangan Usaha dan Kontribusi Terbesar menurut Wilayah Pembangunan 2022

Wilayah Pembangunan	Lapangan Usaha	Kontribusi (%)
Barlingmascakeb	Industri Pengolahan	38,63
	Pertanian	14,85
	Perdagangan	11,07
Purwomanggung	Industri Pengolahan	21,49
	Pertanian	24,85
	Perdagangan	16,80
Subosukawonosraten	Industri Pengolahan	30,67
	Pertanian	12,51
	Perdagangan	16,27
Kedungsepur	Industri Pengolahan	29,70
	Konstruksi	18,61
	Perdagangan	13,67
Banglor	Industri Pengolahan	15,48
	Pertanian	22,09
	Pertambangan dan Penggalian	17,67
Wanarakuti	Industri Pengolahan	57,98
	Pertanian	9,69
	Perdagangan	9,78
Petanglong	Industri Pengolahan	30,15
	Pertanian	23,44
	Perdagangan	14,68
Bregasmalang	Industri Pengolahan	23,64
	Pertanian	23,44
	Perdagangan	16,63

Di antara 8 wilayah pembangunan, terdapat 2 wilayah yang memiliki sektor dengan kontribusi terbesar yang lebih variatif dibandingkan dengan wilayah pembangunan lainnya, yaitu kawasan Kedungsepur dengan sektor konstruksi yaitu sebesar 18,61 persen yang menjadi salah satu dari 3 sektor dengan kontribusi terbesar. Hal ini mengingat kawasan Kedungsepur terdapat pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang terdapat pembangunan besar, selain itu juga pembangunan tol di kawasan Demak, serta adanya kawasan industri di Kendal. Sementara itu kawasan Banglor terdapat sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 17,67 persen sebagai salah satu sektor dengan kontribusi terbesar ketiga, hal ini dikarenakan adanya kilang pertamina di Cepu, Blora. Sementara wilayah lainnya variatif antara sektor pertanian, industry pengolahan dan perdagangan.

3.2. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja menurut Wilayah Pembangunan

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) di antara 8 wilayah pembangunan yang ada di Jawa Tengah, kawasan dengan jumlah tenaga kerja paling banyak adalah kawasan Petanglong (Pekalongan – Batang – Kota Pekalongan), disusul kawasan Barlingmascakeb dan kawasan Subosukawonosraten. Tiga daerah ini memiliki karakteristik sektor industri pengolahan sebagai sektor dengan kontribusi terbesar di kawasan tersebut. Sementara kawasan dengan jumlah tenaga kerja paling sedikit diantara wilayah pembangunan adalah kawasan wanarakuti yang juga memiliki karakteristik industri pengolahan sebagai sektor dengan kontribusi terbesar.



Gambar 3.2. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja menurut Wilayah Pembangunan Jawa Tengah Agustus 2018 - 2022

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah tenaga kerja di setiap wilayah pembangunan pada umumnya mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja. Pada tahun 2019 pada umumnya mengalami kenaikan jumlah tenaga kerja. Penurunan jumlah tenaga kerja, kemudian bertambah di tahun 2020, jumlah tenaga kerja di 2021 turun lalu naik kembali di tahun 2022. Namun di kawasan Barlingmascakeb jumlah tenaga kerja memiliki pola yang naik mulai tahun 2019 dan 2020, melebihi jumlah tenaga kerja di kawasan Subosukawonosraten yang pada tahun 2018 jumlahnya lebih banyak. Jumlah tenaga kerja yang lebih banyak jika diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan akan mampu meningkatkan perekonomian suatu wilayah.

BAB 4

ILOR WILAYAH PEMBANGUNAN

4.1. Perkembangan ILOR Wilayah Pembangunan

Berkembangnya ilmu ekonomi dan perubahan kondisi sosial ekonomi di masyarakat menyebabkan paradigma tentang keberhasilan pembangunan daerah yang hanya mengacu pada tingginya pertumbuhan ekonomi mulai berubah. Bagaimana keadaan indikator sosial seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan mulai diperhitungkan dalam analisisnya. Indikator ILOR (*Incremental Labour Output Ratio*) menjadi salah satu ukuran elastisitas dalam mengukur efektifitas peningkatan output terhadap tenaga kerja di suatu wilayah dalam waktu tertentu.

ILOR merupakan rasio dari selisih tenaga kerja dibanding dengan selisih output perekonomian, yang dalam hal ini menggunakan produk barang dan jasa harga konstan yang dihasilkan suatu wilayah, dalam rentang waktu yang sama. ILOR menurut Wilayah Pembangunan digunakan untuk melihat elastisitas peningkatan output di wilayah pembangunan terhadap tenaga kerja di wilayah tersebut. Berikut perkembangan ILOR menurut Wilayah Pembangunan Jawa Tengah dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

**Tabel 4.1. Nilai ILOR menurut Wilayah Pembangunan
Jawa Tengah, 2018-2022**

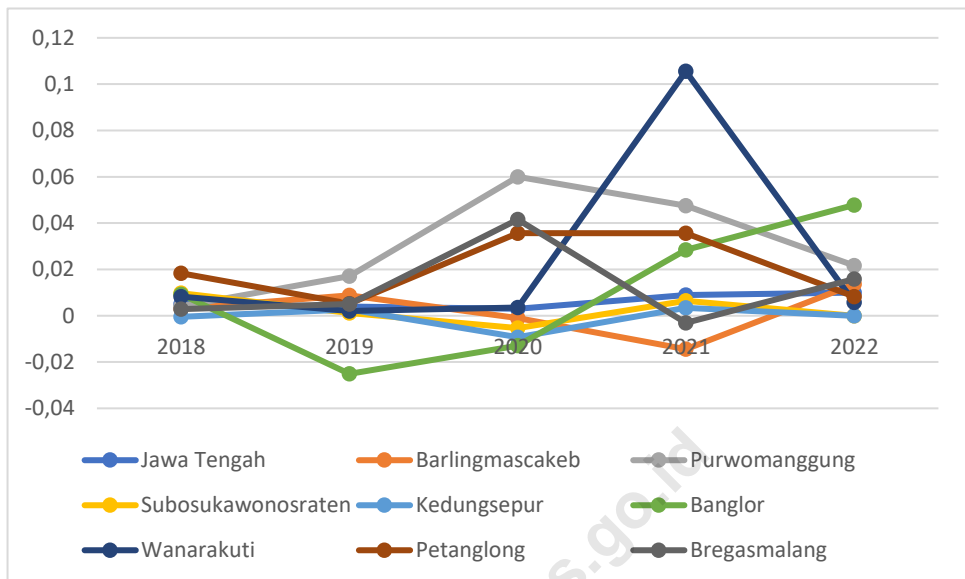
Wilayah Pembangunan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jawa Tengah	0,005	0,004	0,003	0,009	0,010
Barlingmascakeb	0,003	0,009	(0,001)	(0,014)	0,014
Purwomanggung	0,004	0,017	0,060	0,048	0,022
Subosukawonosraten	0,010	0,001	(0,005)	0,006	0,000
Kedungsepur	(0,000)	0,003	(0,009)	0,003	0,000
Banglor	0,009	(0,025)	(0,013)	0,028	0,048
Wanarakuti	0,008	0,002	0,003	0,106	0,006
Petanglong	0,018	0,005	0,036	0,036	0,008
Bregasmalang	0,003	0,005	0,042	(0,003)	0,016

Secara umum, tabel 4.1. menunjukkan nilai ILOR menurut Kawasan Pembangunan Jawa Tengah pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Jika diperhatikan dari setiap wilayah pembangunan, belum ada yang mencapai nilai 1. Artinya, setiap kenaikan output perekonomian (PDRB ADHK) sebesar 1 juta rupiah di Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah, belum mampu untuk menyerap tenaga kerja.

Pada tabel 4.1 juga terlihat bahwa terdapat ILOR dengan nilai positif dan ILOR negatif. Jika dikaitkan dengan peluang penyerapan tenaga kerja, ILOR positif bermakna setiap tambahan satu satuan unit PDRB ADHK akan mampu menyerap sejumlah tenaga kerja. Sehingga, semakin besar ILOR semakin baik karena semakin banyak tenaga kerja yang dapat diserap. Tentunya, untuk melihat besarnya angkatan kerja yang tidak terserap masih harus melihat nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dalam hal ini menurut Wilayah Pembangunan.

Sementara itu jika ILOR bernilai negatif artinya dalam kurun waktu tertentu ada ketimpangan antara perubahan tenaga kerja yang terserap dan perubahan output perekonomian. Ada kalanya telah terjadi pengurangan dalam penyerapan tenaga kerja tetapi masih mampu menghasilkan nilai output yang cukup tinggi. Atau banyak tenaga kerja yang terserap tetapi justru terjadi penurunan nilai tambah bruto. Kedua hal tersebut akan sama-sama berdampak kurang baik pada dimensi sosial maupun ekonomi. Untuk daerah-daerah yang masih berkembang tentunya akan mengutamakan terserapnya tenaga kerja dalam jumlah besar terlebih dahulu pada tingkat produktifitas yang masih relatif baik.

Pada tahun 2022, nilai ILOR kawasan Barlingmascakeb sebesar 0,014 hal ini berarti dalam kurun waktu satu tahun, kenaikan output sebesar 1 milyar rupiah baru akan menyerap tenaga kerja sebanyak 14 orang di kawasan Barlingmascakeb. Pada tahun 2022 nilai ILOR terbesar adalah kawasan Banglor, yaitu 0,048 yang artinya dalam kurun waktu satu tahun, kenaikan output sebesar 1 milyar rupiah baru akan menyerap tenaga kerja sebanyak 48 orang di kawasan Banglor. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, setiap kenaikan output sebesar 1 milyar rupiah pada tahun 2022 wilayah Banglor menyerap tenaga kerja paling banyak jika dibandingkan dengan kawasan lain, diikuti kawasan Purwomanggung sebanyak 22 orang dan kawasan Bregasmalang sebanyak 16 orang.



Gambar 4.1. Perkembangan ILOR Wilayah Pembangunan Jawa Tengah 2018-2022

Jika menggunakan rata-rata nilai ILOR dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu perbandingan antara total penambahan tenaga kerja per tahun dengan penambahan besaran nilai output per tahun di Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah selama lima tahunan (2018-2022), maka didapatkan rata-rata ILOR Jawa Tengah dari tahun 2018-2022 sebesar 0,018. Artinya, secara rata-rata, setiap meningkatkan output perekonomian Jawa Tengah sebanyak 1 milyar rupiah akan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 9 orang per tahun. Jika menurut Wilayah Pembangunan, rata-rata ILOR terbesar adalah kawasan Purwomanggung yaitu sebesar 0,028 diikuti oleh kawasan Banglor dan Petanglong sebesar 0,026. Sementara rata-rata ILOR terkecil diantara wilayah pembangunan adalah kawasan Wanarakuti yaitu sebesar 0,014. Rata-rata ILOR Kawasan Purwomanggung dari tahun 2018-2022 sebesar 0,028. Artinya, secara rata-rata, setiap

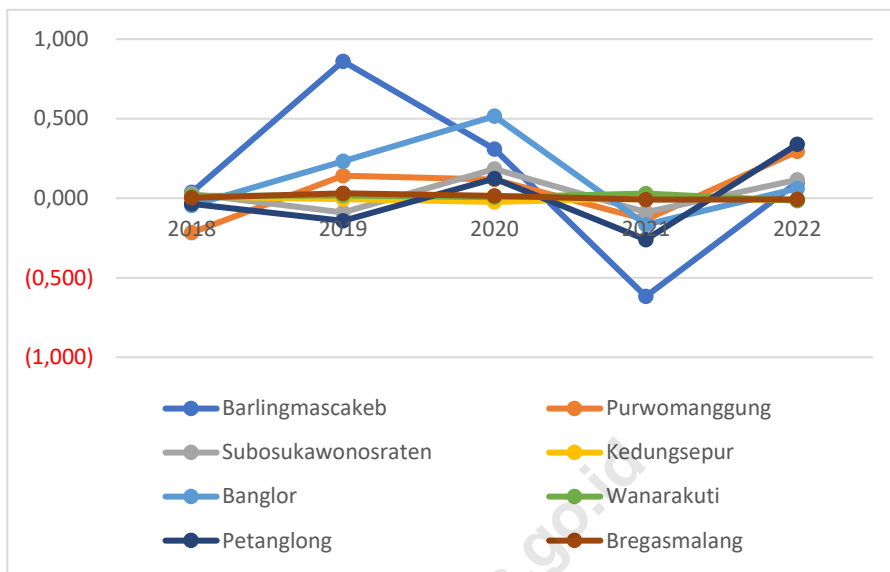
meningkatkan output perekonomian kawasan Purwomanggung sebesar 1 milyar rupiah, akan menyerap tenaga kerja sebanyak 28 orang per tahun.

**Tabel 4.2. Rata-rata ILOR 5 tahun terakhir
menurut Wilayah Pembangunan
Jawa Tengah 2018-2022**

Wilayah Pembangunan	Rata-rata ILOR 5 tahun (2018-2022)
Jawa Tengah	0,018
Barlingmascakeb	0,017
Purwomanggung	0,028
Subosukawonosraten	0,018
Kedungsepur	0,013
Banglor	0,026
Wanarakuti	0,014
Petanglong	0,026
Bregasmalang	0,025

4.2. ILOR Wilayah Pembangunan di Jawa Tengah menurut 3 Sektor Lapangan Usaha

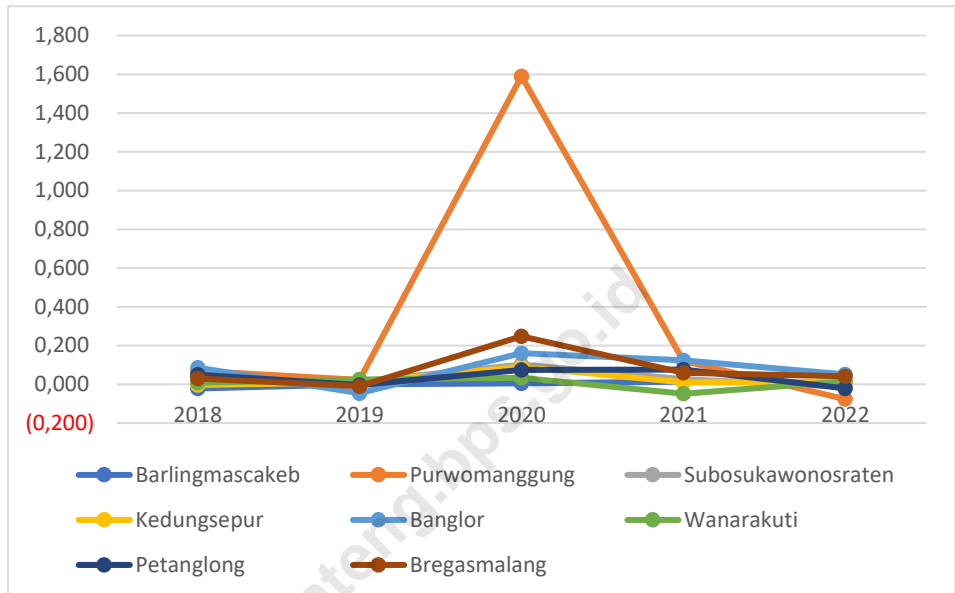
Di antara 8 wilayah pembangunan di Jawa Tengah, pada tahun 2022, 3 sektor lapangan usaha yang dominan antara lain sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Kecuali di kawasan Kedungsepur sektor pertanian digantikan dengan sektor konstruksi, dan di kawasan Banglor sektor perdagangan digantikan dengan sektor Pertambangan dan Penggalian, sementara 6 kawasan lainnya merupakan kombinasi ketiga sektor antara sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.



Gambar 4.2. Nilai ILOR Kawasan Pembangunan Jawa Tengah menurut Sektor Pertanian 2018-2022

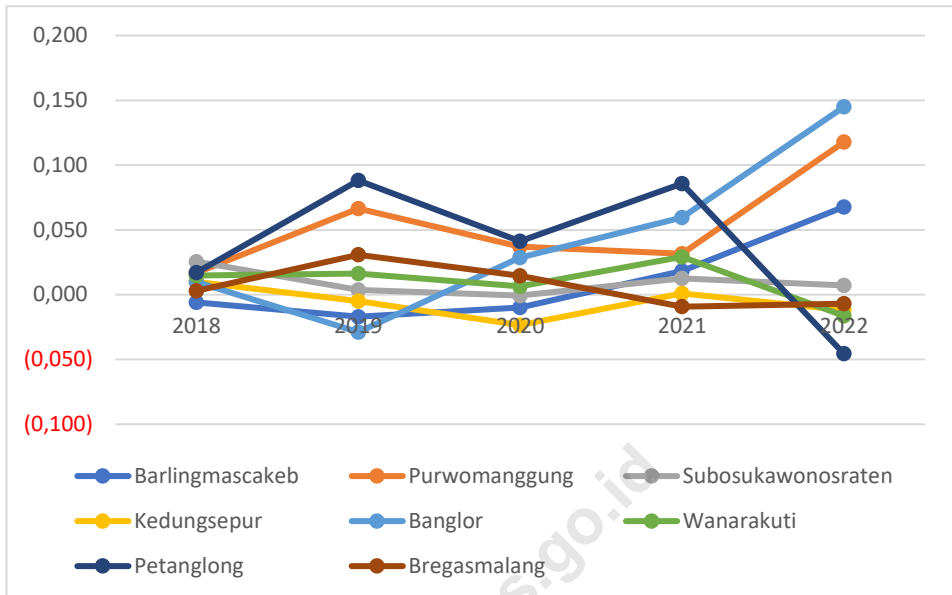
Pada gambar 4.2. terlihat nilai ILOR Kawasan Pembangunan Jawa Tengah pada Sektor lapangan usaha pertanian tahun 2018-2022. Diantara 8 kawasan pembangunan selama lima tahun terakhir nilai ILOR bervariasi dari positif dan negatif, serta nilai yang berbeda-beda. Adanya fluktuasi penyerapan tenaga kerja di sektor Pertanian dikarenakan sebagian besar tenaga kerja pertanian merupakan pekerja yang tidak tetap/pekerja bebas, selain itu juga tergantung pada musim tanam/panen dan jenis tanaman yang sedang diusahakan. Misalkan ketika musim panen tembakau maka ibu rumah tangga akan berbondong-bondong untuk bekerja sebagai buruh tani, namun ketika musim tembakau telah habis, mereka beralih pada kelompok bukan angkatan kerja, yakni kembali sebagai ibu rumah tangga. Pada tahun 2020 ketika terjadi pandemi Covid, nilai ILOR di 8 wilayah pembangunan mengalami kenaikan, lalu

berkurang di tahun 2021 kemudian naik kembali di 2022. Jika diperhatikan hal ini pada tahun 2021 kegiatan industri mulai beroperasi menuju era new normal setelah serangan wabah covid di 2020.



Gambar 4.3. Nilai ILOR Kawasan Pembangunan Jawa Tengah menurut Sektor Industri Pengolahan 2018-2022

ILOR menurut wilayah pembangunan pada sektor industri pengolahan memperlihatkan tren yang relatif sama besar nilainya di antara wilayah pembangunan, hal ini dilohat dari garis-garis grafik yang berdempetan, meskipun pada tahun 2020 terjadi gejolak di kawasan Purwomanggung sebesar 1,590.



Gambar 4.4. Nilai ILOR Kawasan Pembangunan Jawa Tengah menurut Sektor Industri Pengolahan, 2018-2022

Pada sektor perdagangan, nilai ILOR pada era pandemi covid terjadi penurunan, hal ini berarti sektor perdagangan sangat terdampak pandemi yang menyebabkan penyerapan tenaga kerja mengalami pengurangan, berbeda dengan sektor pertanian yang pada era pandemi di 2020 malah menyerap tenaga kerja yang lebih banyak. Akan tetapi pada tahun 2021 terjadi peningkatan ILOR dari sektor perdagangan terus berlanjut di tahun 2022. Hal ini menggambarkan sektor perdagangan mulai bergeliat kembali dengan adanya penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat.

Pada tahun 2022 diantara sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan, nilai ILOR di sektor pertanian pada umumnya memiliki nilai yang paling besar di antara 2 sektor lainnya. Kecuali di kawasan Purwomanggung, nilai ILOR terbesar adalah sektor perdagangan yaitu sebesar 0,118. Di

kawasan Banglor, nilai ILOR terbesar juga dari sektor perdagangan.

**Tabel 4.3. Nilai ILOR
menurut Wilayah Pembangunan dan Sektor Pertanian,
Industri Pengolahan dan Perdagangan
Jawa Tengah 2022**

Wilayah Pembangunan	Pertanian	Industri Pengolahan	Perdagangan
Barlingmascakeb	0,100	0,012	0,068
Purwomanggung	0,294	(0,077)	0,118
Subosukawonosraten	0,115	(0,013)	0,007
Kedungsepur	(0,012)	0,013	(0,012)
Banglor	0,060	0,051	0,145
Wanarakuti	(0,016)	0,014	(0,016)
Petanglong	0,338	(0,021)	(0,046)
Bregasmalang	(0,007)	0,041	(0,007)

BAB 5

KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi tidak lagi hanya dilihat dari bagaimana keberhasilan pertumbuhan ekonominya, melainkan juga seberapa berhasil apa output yang tercipta dalam menyerap tenaga kerja, dimana tidak hanya kondisi ekonomi yang menjadi konstrain melainkan juga kondisi sosialnya. Melalui analisis Indikator ILOR (*Incremental Labour Output Ratio*) dan produktifitas tenaga kerja, didapat suatu ukuran elastisitas yang dapat mengukur efektifitas peningkatan output terhadap tenaga kerja di suatu wilayah dalam waktu tertentu sekaligus produktifitasnya.

Rata-rata ILOR menurut kawasan pembangunan di Jawa Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kawasan Barlingmascakeb sebesar 0,017; Purwomanggung sebesar 0,028; Subosukawonosraten sebesar 0,018; Kedungsepur sebesar 0,013; Banglor sebesar 0,026; Wanarakuti sebesar 0,014; Petanglong sebesar 0,026 dan Bregasmalang sebesar 0,025. Nilai rata-rata ILOR terbesar di antara wilayah pembangunan di Jawa Tengah adalah di kawasan Purwomanggung yaitu sebesar 0,028, artinya, secara rata-rata, setiap meningkatkan output perekonomian kawasan Purwomanggung sebesar 1 milyar rupiah, akan menyerap tenaga kerja sebanyak 28 orang per tahun.

Di antara 8 wilayah pembangunan di Jawa Tengah, pada tahun 2022, 3 sektor lapangan usaha yang dominan antara lain sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Kecuali di kawasan Kedungsepur dan Banglor dimana sektor pertanian digantikan oleh sektor Konstruksi dan sektor Pertambangan dan Penggalian Sektor pertanian paling banyak menyerap tenaga kerja dibandingkan sektor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Lumajang, 2017. *Incremental Labour Output Ratio (ILOR)*
- Kabupaten Lumajang Tahun 2017*. Lumajang: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022. *Analisis Profil Penduduk Jawa Tengah*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019. *Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Tengah Agustus 2018*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2020. *Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Tengah Agustus 2019*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021. *Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Tengah Agustus 2020*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah
- BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022. *Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Tengah Agustus 2021*. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto, 2018. *Incremental Capital Output Ratio dan Incremental Labour Output Ratio (ILOR) Tahun 2017*.
- Mojokerto: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mojokerto
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.2019. Perda Provinsi Jawa Tengah No : 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023. Semarang.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomr 79 Tahun 2019. Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung, Dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemasang

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl.Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195

Homepage : <http://jateng.bps.go.id> e-mail : bps3300@bps.go.id

